

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2024). *Intermediate Accounting IFRS, International Adaptation (5th ed.)*. Wiley Global Education US.
- Natalia, F., Mahardhini, O., Setyawan, B. A., Satriawan, T. F., Forturia, A., Sari, P.G.A., Widuri, S., & Sugara, S. (2022). *Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang*. Universitas Multimedia Nusantara.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting Information Systems, Global Edition (15th ed.)*. Pearson International Content.
- Saraswati, D., & Putra, A. (2020). *Akuntansi Keuangan: Tinjauan IFRS Edisi Revisi*. CV Andalan Bintang Ghonim.
- Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2022). *Financial accounting: With International Financial Reporting Standards (5th Ed)*. Wiley Global Education US

Peraturan

- BPK RI. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988>
- BPK RI. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990>
- BPK RI. (1998). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54823/pp-no-24-tahun-1998>
- BPK RI. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- BPK RI. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- BPK RI. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- BPK RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54823/pp-no-24-tahun-1998>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). (2013). *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Nomor 03 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/PKAK-03-Pengaruh-Perubahan-Kurs-Valuta-Asing.pdf>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17626>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15693>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/242-pmk-03-2014>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/a0aa02e4-837d-4236-baba-7095e2ace61a/2023pmkeuangan048.pdf.pdf>

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/80-pmk-03-2010>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/82d6ff76-02e8-460e-b603-7bfb24f8a855/59~PMK.03~2022Per.pdf>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah*. <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/f128868e-3cf6-4596-8407-c34eeca0e7be/2024pmkeuangan131.pdf>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pemungutan-pajak-penghasilan-pasal-22-sehubungan-dengan-pembayaran-atas-penyerahan-1>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/257823/pmk-no-72-tahun-2023>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-11pj2025>

Website

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>

PT Amalgamated Consulting Indonesia (2025). *Company Profile*. <https://amalgamated.co.id/id/firm/>

